

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN UMUM
PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**DHURANI BALQIS
07011281621083**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI
RUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

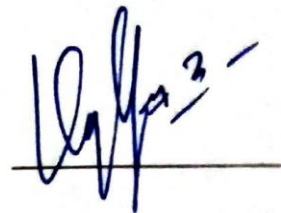
Oleh :

**DHURANI BALQIS
07011281621083**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

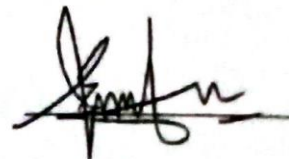
Pembimbing I

**Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 196704121992032 002**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si.
NIP. 196911191998032001**



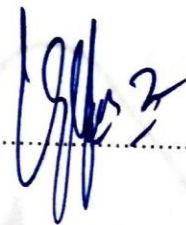
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Agustus 2021.

Indralaya, 9 Agustus 2021

Ketua

1. Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 19670412 1992032 002

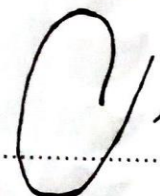


Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001



3. Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 19581119 198503 1 003



4. Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
NIP. 19810608 200812 2 002



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhurani Balqis
Nim : 07011281621083
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri
Rumahannya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui
Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang
Alamat : Rumah Qur'an Mardhatillah Kompleks Griya Cipta Utama, Kec.
Inderalaya, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
No. HP : 081372457173

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang salah tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiatisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakans ebagaimana mestinya.

Inderalaya, 23 September 2021

Yang membuat pernyataan



Dhurani Balqis
NIM. 07011281621083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(QS. Muhammad: 7)

“..Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Asy-Syarah: 5-8)

“..Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahu.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

**Atas Ridho Allah SWT,skripsi ini
kupersembahkan kepada :**

- Papa terbaik Hasnil Hendri dan Mama terhebat Darneti Ariesti.
- Paman terbaikku Mak Uniang Acin, serta mamak dari keluarga ibu.
- Tiga adik laki-laki angkat dari Bibi yang selalu ku rindukan, M. Samirul Hamzah, M. Syahid Al-Rezki dan M. Fadhil Royyan.
- Teman-teman terbaikku, My Best.
- Teman-teman perjalanan semasa kampus GHS, ZQF dan RQM.
- Teman-teman seperjuanganku, AP FISIP 2016.
- Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum signifikannya peningkatan Industri Rumahan dan partisipasi perempuannya masih sedang. Padahal program pendampingan Industri Rumahan dari Dinas PPPAPM Kota Palembang sudah dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan di Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Merille S.Grindle. Menurut teori ini ada dua aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, keberhasilan diukur dari perubahan dan dampak serta yang menjadi tolak ukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Metode penelitian menggunakan *Mixed Methods Exploratory Sequential design*, dimana pengumpulan data diawali dengan data kualitatif dilanjutkan data kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada 44 pelaku Industri Rumahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini telah mengubah pendapatan perempuan industri rumahan dari Rp.500.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00. Namun belum memberikan dampak mensejahterakan perempuan yang merupakan tujuan kebijakan Industri Rumahan. Dari aspek isi kebijakan yaitu pada aspek letak pengambilan keputusan dan aspek sumber daya masih belum terimplementasikan sebesar 52,27% dan kurangnya sumber daya dari pelaksana. Dari aspek lingkungan kebijakan yaitu pada aspek karakteristik lembaga yang kurang tanggap respon dalam menanggapi ketidakmerataan dalam pendistribusian barang IR. Hal ini membuat pelaku industri rumahan dalam partisipasi yang sekadarnya saja, distribusi sumber daya alat bantuan kepada pelaku IR mengalami ketidaksesuaian (tidak merata). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya forum komunikasi dan adanya transparansi pendanaan terhadap distribusi barang bantuan dari pihak pelaksana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pedoman Umum, Industri Rumahan, Pemberdayaan Perempuan.

Pembimbing I



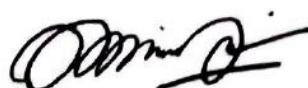
Dr. Nengyanti M. Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II



Ermanovida, S. Sos., M. Si
NIP. 196911191998032001

Inderalaya, September 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the not yet significant increase in Home Industry and the participation of women is still moderate. Even though the Home Industry mentoring program from the PPPAPM Office of Palembang City was implemented in 2016. The research aims to determine the success of implementing the general guidelines for developing home industry policies to improve family welfare through empowering women in Palembang City. The theory used is the implementation theory of Merille S.Grindle. According to this theory there are two aspects that determine the successful implementation of policies that contents of the policy and the policy environment, success is measured by the change and its impact and providing a barometer of the process of achieving the final results(*outcomes*), which is achieved whether or not the objectives to be achieved. The research method uses *Mixed Methods Exploratory Sequential design*, where data collection begins with qualitative data followed by quantitative data by distributing questionnaires to 44 Home Industry players. The results of this study indicate that this program has changed the income of home industry women from Rp. 500.000,00 to Rp. 1,500,000,000.00. However, it has not had an impact on the welfare of women which is the goal of the Home Industry policy. From the aspect of policy content, namely the aspect of the location of decision making and the aspect of resources, 52.27% have not been implemented and the lack of resources from the implementers. From the aspect of the policy environment, namely the characteristics of institutions that are less responsive in responding to inequality in the distribution of IR goods. This makes the home industry players in their meager participation, the distribution of aid tools resources to IR actors is inconsistent (uneven). The results of this study recommend the existence of a communication forum and transparency of funding for the distribution of aid goods from the implementing party.

Keywords: Policy Implementation, General Guidelines, Home Industry, Women's Empowerment.

Advisor I

Dr. Nengvanti, M. Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II

Ermanovida, S. Sos., M
NIP. 196911191998032001

Indralaya, September 2021
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surva Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19810827200912100

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Negara dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang”**.

Dalam melaksanakan penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
2. **Nabi Muhammad SAW**, sebagai Utusan Allah yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. Kedua orang tua, Mak Uniang (paman dari ibu) sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara.
6. Ibu Nengyanti, M.Hum. yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta

memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I saya pada skripsi ini.

7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini sebagai Dosen Pembimbing II saya pada skripsi ini.
8. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S dan Bapak Alamsyah, S.I.P., M.Si. sebagai penguji Ujian Seminar Proposal Skripsi ini
9. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. dan Ibu Dwi Mirani, S.I.P., M.Si. sebagai penguji Ujian Komprehensif Skripsi ini.
10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan
11. Staff karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang yang telah memberikan waktu dan telah memberikan izin untuk penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
13. Kepada sahabat-sahabatku : Rahmad Baihaqi, S.Si dari Universitas Andalas, sahabat Unsri ku Surtina Muthmainnah, S.Ikom , Rima Nanda Yeni, S.A.P , Hikmatul Fajri Mulya, S.Sos, Fajria Septia Sukma, S.T yang slalu ada pada saat duka suka sejak menjadi mahasiswa di kampus perjuangan.
14. Kepada teman-teman kosanku GHS : Rinda Mayang Sari, S.A.P, Nila Hardina, S.A.P Asmawati Ulan Dari S.Sos, Rasniah, S.Sos, Winda Ayu Lestari, S.Sos, Anita Puspita Sari, S.Pd, Asela Ramadona, S.Pd, Putri Rosalina, S.A.P, Kartika Rahmayani, S.Kom tempat berbagi cerita dan saling memotivasi.
15. Kepada Alya Fadhilla, ST teman sekamar di Rumah Qur'an Mardhatilah, Putri

Parmasari, S.Pd, dek Dzuwi Siti Nafia, S.Pd, dek Ira Nada Fakhira, dek Isra Fitrah, dek Lia Amalia, mba Heta Utari, S.Kom, dek Tria Sari, Ayu PDA, dek Sakila Aprilia, dan seluruh personil santriwati RQM terutama kepada mba Rosida tercinta kami.

16. Kepada kakak mba tingkat yang menjadi inspirasi dan membantu saya : Abang Khairunnas, S.I.P, kak Rohim Fahrozi, S.Sos, kak Rahmat Rafinzar, S.A.P, mba Putri, mba Qiqi, mba Hesti, kak Indah Pratasari, S.I.P, kak Hafidzah Salma, S.Sos, kak Panji Ramadhan, S.P, Dini Tarawinda, S.I.P, kak Sandi Kurnia, S.Sos, kak Aref, mba Odet, mba Adelia Utami, mba Melinda, mba Amala yang telah baik menjadi panutan bagi saya.
17. Kepada Antika Febrianti, S.A.P, Ricky Martino, S.A.P, Dwi Setiawan, S.T, Kamal Ihsannuddin, S.Pt, Danindra Adirajsa Kumari, S.T, dan Ilham Sang Pelayar serta seluruh teman jurusan Ilmu Administrasi Publik 2016 FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
18. Keluarga Besar PERMATO SUMSEL (Ikatan Minang di Sumatera Selatan), angkatan Panangah 2016, Keluarga Besar WAKI FISIP UNSRI, Keluarga Besar BEM KM FISIP UNSRI, Keluarga Besar DPM KM UNSRI, Keluarga Besar Pers LIMAS FISIP UNSRI, Keluarga Besar HIMARA, Keluarga Besar KAMMI AL-AQSO, BEM KM UNSRI yang menjadi tempat saya belajar tentang organisasi dan menemukan keluarga diperantauan ini.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.
20. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi. Apabila masih

ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Inderalaya, Agustus 2021

Dhurani Balqis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
TABEL GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Kebijakan Publik	14
2.1.2 Implementasi Kebijakan	15
2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik	17
2.3 Model Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian	23
2.4 Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan	26
2.4.1 Landasan Hukum.....	26
2.4.2 Pengertian Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan (IR)	27
2.4.3 Tujuan Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan (IR).....	30
2.4.4. Ruang Lingkup dan Prinsip Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan (IR)	30
2.4.5 Sasaran Program dan Besaran Modal pada Pelaku Industri Rumahan (IR)	31

2.5 Penelitian Terdahulu	34
2.6 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Definisi Konsep	48
3.3 Fokus Penelitian.....	51
3.4 Unit Analisis Data.....	54
3.5 Informan Penelitian.....	54
3.6 Jenis, Sumber Data dan Keabsahan Data	55
3.6.1 Jenis Data	55
3.6.2 Sumber Data.....	56
3.6.3 Keabsahan Data.....	56
3.7 Populasi dan Sampel	57
3.8 Teknik Pengumpulan Data	58
3.8.1 Dokumen	59
3.8.2 Observasi.....	59
3.8.3 Wawancara.....	60
3.8.4 Metode Angket atau Kuisisioner.....	60
3.9 Teknik Analisis Data.....	60
3.10 Uji Validitas dan Realibitas Data	63
3.11 Teknik Pengolahan Data	68
BAB IV. PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum.....	70
4.1.1 Kota Palembang	70
4.1.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Dinas PPPAPM).....	74
4.2 Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan	86
4.2.1 Tujuan PERMEN PPPA NO. 2 Tahun 2016.....	87
4.2.2 Mekanisme Pelaksanaan berdasarkan PERMEN PPPA NO. 2 Tahun 2016	88
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang	92
BAB V. PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan	121

5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	126
PEDOMAN WAWANCARA	141
KUISIONER PENELITIAN	164
HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS.....	164
OBSERVASI	172
DOKUMENTASI WAWANCARA	179

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kota/Kabupaten yang mendapatkan pendampingan pembinaan Industri Rumahan dari Kementrian PPPA Republik Indonesia pada tahun 2016- 2021.....	6
Tabel 1.2. Jumlah pelaku usaha Industri Rumahan	10
Tabel 2.1. Klasifikasi Industri Rumahan	32
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	52
Tabel 3.2. Bobot Nilai	62
Tabel 3.3. Kategori Nilai.....	62
Tabel 4.1. Kecamatan di Kota Palembang.....	74
Tabel 4.2. Penilaian Responden terhadap Manfaat Industri Rumahan.....	98
Tabel 4.3. Penilaian Responden terhadap Derajat Perubahan adanya Industri Rumahan	102
Tabel 4.4. Penilaian Responden terhadap Sumber Daya yang di gunakan pada Industri Rumahan	107
Tabel 4.5. Penilaian Responden terhadap Tingkat Kepatuhan Industri Rumahan	113
Tabel 4.6. Penilaian Responden terhadap Dampak dan Peubahan Industri Rumahan	115
Tabel 4.7. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan	117

TABEL GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2020	2
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran	46
Gambar 4.1. Grafik Luas Wilayah Kota Palembang, Kec. IB II dan Kel. 27 dan 30 Ilir	72
Gambar 4.2. Struktur Jabatan Organisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PPPAPM) Kota Palembang	85
Gambar 4.3. Alur Program Kegiatan Industri Rumahan.....	91
Gambar 4.4. Penerima manfaat Industri Rumahan	100
Gambar 4.5. Usaha ibu-ibu pelaku Industri Rumahan.....	103
Gambar 4.6. Wawancara bersama staff/pegawai Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Usaha Perempuan Dinas PPPAPM.....	105
Gambar 4.7. Distribusi bantuan Alat IR dari Dinas PPPAPM.....	107
Gambar 4.8. Hubungan antara sumberdaya, pengelola IR dengan Pelaku IR.....	108
Gambar 4.9. Pelatihan Diversifikasi Pangan bagi Industri Rumahan (IR).....	110
Gambar 4.10. Pelatihan Packing dan Pemasaran untuk Industri Rumahan (IR)	113
Gambar 4.11. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	114
Gambar 4.12. Dampak Perubahan Industri Rumahan.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Tugas Skripsi	126
Lampiran 2	: Surat Penelitian Dinas PPPAPM Kota Palembang	127
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian Dinas PPPAPM Kota Palembang	128
Lampiran 4	: Kartu Bimbingan 1 Seminar Proposal.....	129
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan 2 Seminar Proposal	131
Lampiran 6	: Lembar Pengesahan Seminar Proposal	132
Lampiran 7	: Lembar Revisi Seminar Proposal	133
Lampiran 8	: Surat Keterangan Skripsi.....	139
Lampiran 9	: Kartu Bimbingan Skripsi	140
Lampiran 10	: Pedoman Wawancara	141
Lampiran 11	: Transkrip Wawancara	144
Lampiran 12	: Kuisisioner Penelitian.....	161
Lampiran 13	: Hasil Analisis Uji Validitas Dan Realibilitas.....	164
Lampiran 14	: Observasi.....	172
Lampiran 15	: Dokumentasi Wawancara dan Kuisisioner Bagi IR	179
Lampiran 16	: Surat Izin Penelitian Kesbangpol.....	184
Lampiran 17	: Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016.....	185

DAFTAR ISTILAH

1. Intervensi : Campur tangan suatu instansi dalam urusan tertentu seperti urusan politik, ekonomi dan lainnya
2. Regulasi : Pengaturan
3. Signifikan : Penting
4. Akselerasi : Proses mempercepat
5. Gender : Jenis kelamin
6. Publik : Orang banyak
7. Capable : Mampu
8. Rezim : Pemerintahan yang berkuasa
9. IR (Cottage Industry) : Industri Rumahan
10. Vakum : Kekosongan

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN

1. IR : Industri Rumahan
2. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
6. Kasi : Kepala Seksi
7. Monev : Monitoring dan Evaluasi
8. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
9. PP : Peraturan Pemerintah
10. PPEP : Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
11. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
12. UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
13. UP2K : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
14. KUBE : Kelompok Usaha Bersama
15. P4K : Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
16. P2WKSS : Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera
17. UPKU : Unit Pengelola Keuangan Usaha
18. OPD : Organisasi Perangkat Daerah

AKRONIM

1. KPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
2. BPS : Badan Pusat Statistik
3. PPPAM : Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
4. BAPPEDA : Badan Pembangunan Perencanaan Daerah
5. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
6. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
7. BPMK : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

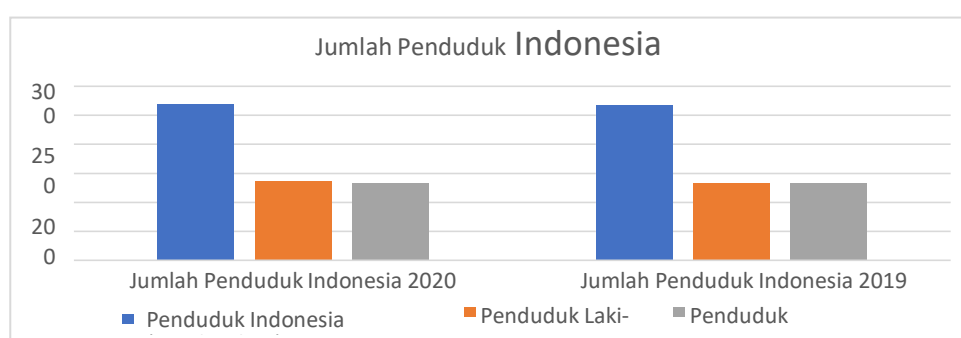
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan Indonesia ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia merupakan negara berkembang dalam proses pembangunan disegala sektor, dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya secara adil, merata dan beradab. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Surani, 2005).

Pada penelitian yang sedang diteliti penulis membahas implementasi kebijakan mengenai pembangunan beserta pemberdayaan, diantara keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, kesamaannya ialah sama-sama dalam perubahan sosial yang secara sengaja atau berencana. Namun ada beberapa perbedaannya diantaranya, (1) pembangunan merupakan crashed program yang bersifat jangka pendek, temporal, dan parsial. Sedangkan pemberdayaan merupakan program berjangka menengah panjang, berkesinambungan dan utuh. (2) Perbedaan dari segi arus ide antara pembangunan dengan pemberdayaan ialah pembangunan arus idenya mengalir topdown, terutama dari pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan indikator evaluasi; sedangkan pada pemberdayaan bottom-up dimana masyarakat sebagai pelaku aktif mulai dari perencanaan, dan pihak luar hanya sebagai fasilitator. (3) Perbedaan dalam segi pembagian dana, pada pembangunan semua

dana dikuasai pelaksana dari luar; sedangkan pada pemberdayaan ada blok dana yang dapat digunakan sendiri oleh masyarakat. Dimana asal kata pemberdayaan ialah berasal dari kata empowerment yang bermakna sebagai secara politis dan struktural. Setidaknya ada 3 (tiga) kata kunci pada pemberdayaan yaitu : peran serta/ partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Pemberdayaan mensyaratkan peran serta yang setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penelitian Surani (2014) menjelaskan bahwasanya strategi pembangunan yang mengarah kepada industrialisasi di Indonesia telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Kehadiran industri-industri kecil hingga industri besar di Indonesia telah menghadirkan peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat dan kaum perempuan. Industri ini memberikan dampak signifikan pemberdayaan manusia yaitu pada masyarakat terkhususnya pada perempuan. Pemberdayaan masyarakat terutama pada kaum perempuan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat dalam Surani, 2009: 62).

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2020



Sumber : Data diolah penulis dari BPS 2020

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan hasil sensus penduduk pada September 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa (50,58%) dan jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang (49,42%) dari penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia 266,92 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 134 juta jiwa (50,27%), sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 132,89 juta jiwa (49,73%). Data ini menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Dalam data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (2020) mendata bahwasanya pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 berjumlah 13,92 juta orang (7,46 juta orang kaum laki-laki, 6,46 juta orang kaum perempuan). Data dari hasil Sakernas Februari 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak diiringi dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yaitu pada Februari 2019 TPAK sebesar 69,32 persen turun 0,15 persen poin menjadi 69,17 persen pada Februari 2020. Distribusi penduduk yang bekerja jika dirincikan paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai (39,84%), diikuti dengan penduduk yang berstatus memiliki usaha/berdagang (38,84%), dan mereka dengan pekerja keluarga (13,16%). Dari data ini menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus memiliki usaha/berdagang tinggi persentasenya, yang mana dari data terbaru dari BPS (2019) jumlah tenaga kerja industri mikro/kecil (industri rumahan) di Indonesia sebanyak 2.212.283 orang. Jumlah ini merupakan bentuk akselerasi melalui pembangunan industri rumahan yang menjadi sebuah solusi dalam mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Industri rumahan merupakan sebuah peluang usaha yang memiliki daya tahan dalam ketahanan ekonomi yang kuat, dan memberikan

pertumbuhan ekonomi yang besar dengan 99,19% dari keseluruhan usaha di sektor industri, perkembangan industri rumahan sampai sekarang masih bertahan bahkan maju keberadaannya di Indonesia.

Dalam penelitian Joesyiana (Joesyiana, 2017) yang membahas Industri Rumahan, menjelaskan bahwa :

“Industri Rumahan dan rumah tangga memiliki tiga alasan penting yang mendasari keberadaannya di Indonesia. *Pertama*, adalah karena industri rumahan cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagian dari dinamikanya, industri rumahan sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, karena sering diyakini bahwa industri rumahan memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.”

Menurut hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPPA) Republik Indonesia bersama Institut Pertanian Bogor (2011) menyatakan bahwa Industri Rumahan (IR) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuka peluang tenaga kerja, dan agar berkurang tenaga kerja yang bermigrasi menjadi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang (*trafficking humans*). Suatu kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari kondisi dinamis keluarga terpenuhi semua kebutuhan fisik materil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan mereka dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Mongid dalam Tumbage, 1995: 10)

Besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia mengharuskan pemerintahan menuntaskan tantangan dalam mensejahterakan rakyatnya, maka pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dengan berbagai strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun program kegiatan dapat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PNPM Mandiri Perdesaan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (P2WKSS), serta Industri Rumahan dalam kerangka Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Tentunya kesejahteraan menjadi perhatian khusus Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu Pasal 1 ayat ke-2 yang menjelaskan:

“Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat (adapun pemberdayaan perempuan), pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam meningkatkan kegiatan ekonomi”.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menguraikan tujuan universal dengan targetan global dan sasaran nasional RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 telah dilaksanakan, ialah sebuah tujuan yang kelima berbunyi mewujudkan kesejahteraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat perlu diperhatikan dan termasuk masalah yang mendesak bagi pemerintah, maka perlu diimbangi dengan penyadaran masyarakat (*public awareness*) dan dibutuhkan partisipasi perempuan dalam program Industri Rumahan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA Nomor. 2 Tahun 2016 ini.

Hal inilah membuat pemerintah berinisiatif mengajak perempuan berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi melalui sektor usaha, dan melalui program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka kebijakan menteri PPPA Republik No.2 Tahun 2016 perlu dioptimalkan serta perlu mendapatkan dukungan program-program sektoral mengingat kebijakan pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan lintas pelaku, kebijakan ini mendorong pembangunan Industri Rumahan (IR) sehingga diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan di bidang kesetaraan gender.

Kebijakan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2016 pada pasal 3:

“Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan ini merupakan tindak lanjut Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”

Kementerian PPPA mendistribusikan kebijakan No.2 Tahun 2016 ini ke 21 kota/kabupaten di Indonesia yang menjadi target program PPEP berlandaskan Industri Rumahan yang dijalankan termasuklah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Palembang, perempuan pelaku Industri Rumahan (IR) diberdayakan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan keluarga dalam produktivitas ekonomi perempuan. Bentuk dari program Industri Rumahan (IR) juga mengutamakan meningkatnya potensi atau kualitas perempuan pelaku IR agar dapat membangkitkan semangat berpartisipasi sebagai perempuan Indonesia yang notabennya sekarang bahwa perempuan di Indonesia masih sering menjadi hal yang terlupakan dari segi dimensi feminisme serta ketimpangan gender dalam ruang lingkup kemiskinan. Untuk itu IR (Industri Rumahan) merupakan salah satu cara solutif dari pemerintah, berikut ini merupakan tabel nama kota/kabupaten yang mendapatkan pendampingan pembinaan atau pendistribusian kebijakan Nomor 2 Tahun 2016, diantaranya ialah:

Tabel 1.1. Kota/Kabupaten yang mendapatkan pendampingan pembinaan Industri Rumahan dari Kementerian PPPA Republik Indonesia pada tahun 2016- 2021

No.	Kota/Kabupaten	Provinsi
1.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau
2.	Kabupaten Bangka Tengah (Koba)	Kepulauan Bangka Belitung
3.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
4.	Kabupaten Solok	Sumatera Barat
5.	Kota Palembang	Sumatera Selatan
6.	Kabupaten Lampung Timur (Sukadana)	Lampung
7.	Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda)	Lampung
8.	Kabupaten Cilegon	Banten
9.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat
10.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah
11.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah

No.	Kota/Kabupaten	Provinsi
12.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
13.	Kabupaten Kulonprogo	Yogyakarta
14.	Kota Tulungagung	Jawa Timur
15.	Kabupaten Gianyar	Bali
16.	Kabupaten Lombok Tengah (Praya)	Nusa Tenggara Barat
17.	Kabupaten Sumba Barat (Waikabubak)	Nusa Tenggara Timur
18.	Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo)	Nusa Tenggara Timur
19.	Kabupaten Ternate	Maluku Utara
20.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
21.	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah

Sumber : Data diolah penulis dari Dinas PPPAPM Kota Palembang

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kementerian PPPA Republik Indonesia mendistribusikan kebijakan ini ke 21 Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuklah Sumatera Selatan yang merupakan salah satu diantara 10 provinsi yang paling tinggi penduduk miskinnya di Indonesia (sumber link yaitu <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020>). Kota Palembang mendapatkan pendampingan pembinaan Industri Rumahan (IR) diantara kabupaten/kota di Indonesia. Menurut BPS Kota Palembang (sumber link ialah <https://sumsel.bps.go.id/indicator/23/683/1/jumlah-penduduk-miskin-maret.html>) Ibukota Provinsi ini menduduki peringkat penduduk miskin tertinggi di Sumatera Selatan pada Tahun 2020 berjumlah 182,60 juta jiwa (10,89%), penduduk laki-laki berjumlah 837.031 jiwa dan penduduk perempuannya berjumlah 831.817 jiwa. Ini salah satu menjadi alasan melatarbelakangi Kota Palembang mendapatkan pendampingan pembinaan Industri Rumahan (IR) dari Kementerian PPPA Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan, maka dibentuklah Kesepakatan Bersama (MOU) antara Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang tentang Proyek Pengembangan Industri Rumahan bagi Perempuan di Kota Palembang Nomor: 5F/KPP-PA/05/2016 dan Nomor: 07/MOU/BKB-PP/2016.

Kesepakatan ini menetapkan lokasi kegiatan pengembangan pembangunan Industri Rumahan Kota Palembang di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang berada di dua kelurahan yaitu kelurahan 27 Ilir dan kelurahan 30 Ilir, kedua kelurahan tersebut disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan di lingkungan tersebut. Jumlah pelaku Industri Rumahan (IR) di kecamatan tersebut cukup banyak, dikarenakan itu kecamatan Ilir Barat II menjadi salah satu tempat pusat kuliner Kota Palembang yang merupakan tempat strategis untuk pembinaan IR dan menjadi salah satu pilot projek di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh Evi Silvia Melina dkk. (2012: 872-880) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang”, studi kasus pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini kegiatan programnya meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam, kegiatan Sarpas (Sarana dan Prasarana), dan peningkatan SDM. Namun, dalam pelaksanaannya kurang optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan system yang dianggap rumit bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu).

Penelitian dari Rosseriyu Murenati Putri dkk. (2012:145-153) Jurusan Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi pada Masyarakat Jombang”, studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jombang berjalan dengan baik,

nampak keberhasilannya pada keberhasilan program program serta kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat keganjilan yaitu *stakeholder* hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat, yang mana tentunya diperlukan peran swasta mendukung program ini agar keadilan dan kesetaraan gender dapat menyeluruh.

Adapun penelitian dari Adelia Utami dkk. (2019: 144-153) Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan judul “Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1. tingkat partisipasi pelaku IR tergolong sedang (64,35%), 2. tingkat peran pendamping pelaku IR tergolong tinggi (76,60%), 3. terdapat hubungan yang signifikan antara peran pendamping IR dan partisipasi pelaku IR dalam program pemberdayaan perempuan dengan nilai koefisien korelasi Rank Spearman (R_s) = 0,620 pada $\alpha = 0,05$.

Kaitan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama memiliki kesamaan dalam peningkatan usaha ekonomi keluarga, dan yang menjadi perbandingan pada penelitian pertama oleh Evi Silvia Melina dkk (2012: 872-880) yaitu adanya system Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu), pada penelitian kedua oleh Rosseriayu Murenati Putri dkk (2012:145-153) ialah *stakeholder* hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat, dan penelitian ketiga oleh Adelia Utami dkk (2019: 144- 153) ialah hubungan peran pendamping dan partisipasi pelaku Industri Rumahan yang signifikan.

Kebijakan PPPA No.2 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 pada point J menyatakan bahwa prinsip pembangunan Industri Rumahan (IR) harus dapat membangun legalitas usahanya. Namun banyak terjadi di lapangan bahwa pelaku IR belum membuat izin legalitas usahanya. Data dari Dinas PPPAPM Kota Palembang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan jumlah pelaku Industri Rumahan di Kota Palembang berjumlah 662

pelaku usaha di Tahun 2016. Pelaku IR yang dibina pada Tahun 2017 berjumlah 198 orang (IR dari APBD sebanyak 148 orang, IR dari APBN sebanyak 50 orang) dan pelaku IR yang dibina pada Tahun 2018 berjumlah 80 orang. Pada tahun 2019 Pelaku IR masih berjumlah 80 orang (41 orang di Kelurahan 27 Ilir dan 39 orang di Kelurahan 30 Ilir). Pada tahun 2020 pelaku Industri Rumahan ini divakumkan disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, karena anggaran dana ini dialihkan oleh Dinas PPPAM Kota Palembang kepada program yang mendukung pencegahan covid. Dibawah ini tabel 1.2 jumlah pelaku Industri Rumahan (IR) yang mendapatkan pembinaan pada dua kelurahan ini sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Pelaku Usaha Industri Rumahan

No.	Kategori	2016	2017		2018	2019
		Jumlah IR	Jumlah IR dari APBD	Jumlah IR dari APBN	Jumlah IR	Jumlah IR
1.	IR 1 (Pemula)	12	14	31	1	1
2.	IR 2 (Berkembang)	648	12	12	75	75
3.	IR 3 (Maju)	2	1	7	4	4
Jumlah		662	148	50	80	80

Sumber : Data diolah penulis dari Dinas PPPAM Kota Palembang

Data pada tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku industri rumah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, jumlah terendah berada pada tahun 2018 dan 2019. Pendampingan pembinaan IR ini merupakan salah satu pelaksanaan dari langkah- langkah kegiatan Pembangunan Industri Rumahan yang diatur pada Kebijakan PPPA No.2 Tahun 2016 pada pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim formatur dalam pengelolaan industri rumahan
- b. RENJA (Rencana Kerja) IR dan jadwal kegiatan program IR
- c. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
- d. Identifikasi sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam perkembangan usaha IR
- e. Mengidentifikasi bentuk dan isi modul pelatihan IR
- f. Penetapan dan fixsasi lokasi Industri Rumahan
- g. Mensurrvey para pelaku IR
- h. Menganalisis hasil survei beserta penyusunan desaian intervensi atau desain kegiatan Industri Rumahan
- i. Penyusunan rencana pelaksana program Industri Rumahan
- j. Pelaksanaan kegiatan (pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha IR)
- k. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha IR

Tolak ukur keberhasilan Industri Rumahan (IR) tertera pada Peraturan Mentri PPPA

Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 Pasal 9 menyatakan bahwa “Tolak ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan”.

Pada pelaksanaan program Industri Rumahan (IR) tentunya ada peran pendamping yang difasilitasi oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang, yang mana peran pendamping ini merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian (pelaksanaan) suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai oleh para implementor. Peran pendamping dalam hal ini ialah uraian tugas yang sudah diberikan oleh pihak pemberdaya, adapun bentuk peran pendampingan yang diberikan kepada pelaku IR ialah 1. Persiapan sosial bagi pelaku Industri Rumahan, 2. Pembentukan dan pengembang jaringan kerjasama Industri Rumahan, 3. Peningkatan kapasitas/potensi pelaku IR, 4. Memperluas jaringan IR (Juklak Pengembangan IR dalam Utami, 2016:8). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Adelia Utami dkk (2019: 144-153) dapat dilihat bahwa 1. pada persentase peran pendamping pelaku IR tergolong tinggi (76,60%), 2. Antusias partisipasi pelaku IR tergolong sedang (64,35%) di Kota Palembang yaitu pada 2 kelurahan yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang ditemukan peneliti dari latar belakang ini ada tiga hal yang menarik untuk dikaji:

1. Sebagian besar Industri Rumahan (IR) belum memiliki legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis, sedangkan prinsip pembangunan IR legalitas usaha mikro diperlukan.
2. Pendampingan pembinaan Industri Rumahan dari Dinas PPPAPM Kota Palembang bagus atau tergolong tinggi, sedangkan partisipasi pelaku perempuan IR tergolong sedang.

3. Vakumnya program Industri Rumahan di tahun 2020.

Data yang didapatkan penulis dilatar belakang ini menunjukkan bahwa peran pendampingan pembinaan dari Dinas PPPAPM Kota Palembang cukup baik karnatergolong tinggi, namun Industri Rumahan ataupun perempuan pelaku IR mengalami penurunan. Sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan terutama pada pelaksanaan program ini terhadap pelaku industri rumahan yang diberikan oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang, dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang?”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ini maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: **Bagaimana Implementasi Kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pedoman umum mbangunan Industri Rumahan pada pelaku IR dalam kebijakan pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang merupakan sebuah penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini peneliti mengharapkan agar menjadi sebuah informasi, pengetahuan dan dapat menambah ilmu, pengetahuan dalam perkembangan dan perluasan wawasan Ilmu Administrasi Publik tentang implementasi Kebijakan Pedoman

Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat sebagai acuan pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya mengenai kebijakan Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Wahab, Prof. Dr. H. Solichin Abdul. 2012. *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik* Jakarta: Salemba Humanika
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Subarsono, AG. 2009. “Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Creswell, John W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tesis & Jurnal:

- Joesyiana, D. (2017). Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali Kur). *Jurnal Valuta*, 3(1), 159–172.
- Surani, Eni. 2014. *Peranan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. P Nusantara V dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Perehentian Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (<http://repository.uin-suska.ac.id/4112/1/fm.pdf>)
- Utami, Adelia dkk. 2019. *Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan dalam Program Pemberdayaan di Kota Palembang*. Palembang: Program Pascasarjana FISIP UNSRI.

- Hardina, Nila. 2020. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten ogan ilir tahun anggaran 2018*. Inderalaya: FISIP UNSRI.
- Putri, Rosseriayu Murenati dkk. 2012. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi pada Masyarakat Jombang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No (1): 145-153.
- Melina, Evi Silvia dkk. 2012. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. (5): 872-880
- Ihsani, Qashdiyah. 2019. *Implementasi Kebijakan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan*. Inderalaya: FISIP UNSRI.
- Sari, Indah Permata. 2016. *Implementasi Kebijakan Sekolah Filial di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas Ila Palembang*. Palembang: FISIP UNSRI.
- Margareta, Shinta. 2013. *Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan*. Jawa Barat: Fakultas Ilmu Pendidik UPI. (http://repository.upi.edu/1605/6/S ADP_0705056_Chapter3.pdf)

Internet:

- <https://palembangkota.bps.go.id/backend/images/Tenaga-Kerja-Agustus-2020-ind.jpeg>. Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 11.45 WIB
- <https://www.bps.go.id/website/images/Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Agustus-2020-ind.jpg>. Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 11.45 WIB
- <file:///C:/Users/acer/Downloads/BRSbrsInd-20210121150846.pdf>. Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 11.45 WIB
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020>. Diakses pada 2 Februari 2021 pukul 09.45 WIB
- <https://www.bps.go.id/pressrelease.html>, <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>
- <https://sumsel.bps.go.id/statictable.html>. Diakses pada 2 Februari 2021 pukul 09.45 WIB
- <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/08/851/persentase-penduduk-miskin-kota-palembang-pada-maret-2020-sebesar-10-89-persen.html>. Diakses pada 2 Februari 2021 pukul 09.45 WIB
- <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>. Diakses pada 2 Maret 2021 pukul 20.00 wib